

RINGKASAN

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

MODUS OPERANDI

PENYELUNDUPAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN YANG  
YANG TELAH DILAKUKAN DI KOTAMADYA SURABAYA  
( Woerjaningsih, M.Zaidun, Didik Endro P., 1994;  
51 halaman )

Kecenderungan orang melakukan penyelundupan karena ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang terbatas. Surabaya sebagai kota besar, no. 2 di Indonesia tidak luput dari ulah penyelundupan tersebut. Beberapa kali terjadi penyelundupan yang sangat besar nilainya. Hal ini mengakibatkan kerugian di bidang perpajakan yang cukup besar jumlahnya, yang sangat merugikan bagi pembangunan negara.

Bertahun-tahun pemerintahan berurutan menanggapi tindak pidana penyelundupan dengan beberapa kali mengaturnya dan menambah peraturan di bidang ekonomi, ekspor-impor, termasuk peraturan mengenai delik ekonomi dan penyelundupan : Ordonansi Bea Stb. 1882 No. 240. Dengan UU No. 8 Tahun 1958 Ordonansi Bea dimasukkan UUPTE (UU No. 7/Drt/1955) serta Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967. Melalui Keppres No. 73, Presiden RI telah memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk melakukan pengurusan, pemeriksaan terhadap para penyelundup. Berdasarkan Instruksi Nomo Ins-009/JA-95/1990, tanggal 7 Mei 1990, Jaksa Agung telah membentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4), TP4 Dati I, dan TP4 Dati II (Leden Marpaung, 1991: 3).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu : bagaimanakah modus operandi penyelundupan di wilayah Kotamadya Surabaya?, upaya-upaya apakah yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyelundupan di Kotamadya Surabaya?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk dapat memberikan sumbangsaran bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Madya Surabaya, dalam rangka penanggulangan penyelundupan yang paling efektif.

Lokasi penelitian adalah Surabaya, yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan cukup rawan penyelundupan. Data primer diperoleh dengan jalan wawancara dengan aparat di Pelabuhan Tanjung Perak, Juanda, PM Surabaya, Polwiltabes dan Kejari Surabaya. Data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan dan penelitian dari data penyelundupan yang terjadi di Surabaya. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif.

Berdasarkan data yang terkumpul, penyelundupan yang terjadi di Kotamadya Surabaya terjadi terutama dengan cara penyalangan dokumen. Hal ini disebabkan oleh pajak yang bervariasi cukup tinggi dari jenis barang yang berbeda. Di samping itu juga adanya larangan ekspor maupun impor beberapa jenis barang tertentu dengan pertimbangan tertentu dari pemerintah Indonesia.

( L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga :  
048/P4M/DPPM/L.3311/94/BBI/1994, 15 Juni 1994 )

## SUMMARY

PREVENTIVE AND MODUS OPERANDI SMUGGLING  
IN SURABAYA CITY

( Woerjaningsih, M. Zaidun, Didik Endro P., 1994;  
51 pages )

Peoples has a tendency to conduct smuggling because of illegal enrichment that could be gathered quickly by limited capital. Several big smuggling cases have been happened in Surabaya. These cases are damaging to the finance (especially in fiscal) of the state. The government has been year trying to handle it by revising and changing regulations which is related to the field of economic, export-import, including the regulations of economic and smuggling : Ordonantie Bea Stb 1882 Number 240 or the Ordonantie has been inserted into UUPTE (UU Number 7/Drt/1955) by UU Number 8/1958. The material is also inserted into Keppres Number 73/1967. The said Keppres, articulated that the President of Republic Indonesia gives an authority to the Attorney General for examination and investigation on the smuggling cases. Intruction Number Ins.009/JA95/1990, May 7 1990, the Attorney General has form a special task force team (TP4) to handle the smuggling cases both in national scope and local scope (Dati I and Dati II).

Based on the background, formulation of the researched problems are: how is "modus operandi" of the smuggling cases as cases in Surabaya city? What kind of effort have been carried out for handling the cases?

The research aims to give advices and effort to the government, especially the government of Surabaya city, for handling affectively the smuggling cases.

Location of the research will be held Surabaya, as the second biggest city in Indonesia that has a serious problems on the smuggling. Primary data will be obtained

by interviewing of the some officers on Tanjung Perak Harbour, Juanda Airport, the Surabaya Court. Polwanitabes Surabaya, the officer of the prosecution of Surabaya (KEjari Surabaya). Then the secondary data will be gathering by library study that related on smuggling. Finally, the research will be analyze by quantitative and qualitative method.

Based the collected data, smuggling in Surabaya city done by falsified of the document. These Happened because of the hight variation fiscal from difference quality of thing. Beside that, the government of Republic Indonesia with a special jugement prohibit export and import from some kind of thing.

( Rest. Inst. Faculty of Law Airlangga University :  
048/P4M/DPPM/L.3311/94/BBI/1994, June 15, 1994 )